PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2023

BANTUL BERSAMA
Bersih Sampah 2025

Komplek Kantor Pemda Bantul, Jl. Lkr. Timur Jl. Manding Kidul,
Area Sawah, Trirenggo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55714

BAB I
PENDAHULUAN

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. RKT ini nantinya akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2023 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam Tahun 2023. RKT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 merupakan dokuman yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul pada Tahun 2023.

Visi Bupati Bantul yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”**. Guna mewujudkan visi tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mendukung **Misi ke-4**, yaitu Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2023, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023. RKT ini menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renstra dan Renja sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentarig Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;
19. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul seperti yang tercantum pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021 adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Dinas;
b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup;
c. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
d. penyelenggaraan perencanaan dan penaatan lingkungan hidup;
e. penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
f. penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
g. pengoordinasian fasilitasi pembinaan, penilaian dan penghargaan lingkungan hidup;
h. penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, pertamanan dan perindang jalan;
i. pengoordinasian pelayanan persetujuan lingkungan;
j. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang lingkungan hidup;
k. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
l. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
m. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalianinternal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
o. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri atas;
   a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perencanaan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
   a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
   b. Kelompok Substansi Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
   c. Kelompok Substansi Penegakan Hukum Lingkungan;
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
   a. Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3;
   b. Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
   c. Kelompok Substansi Penanganan Sampah.
5. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:.
   a. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
   b. Kelompok Substansi Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati; dan
   c. Kelompok Substansi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
6. UPTD; dan
7. Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

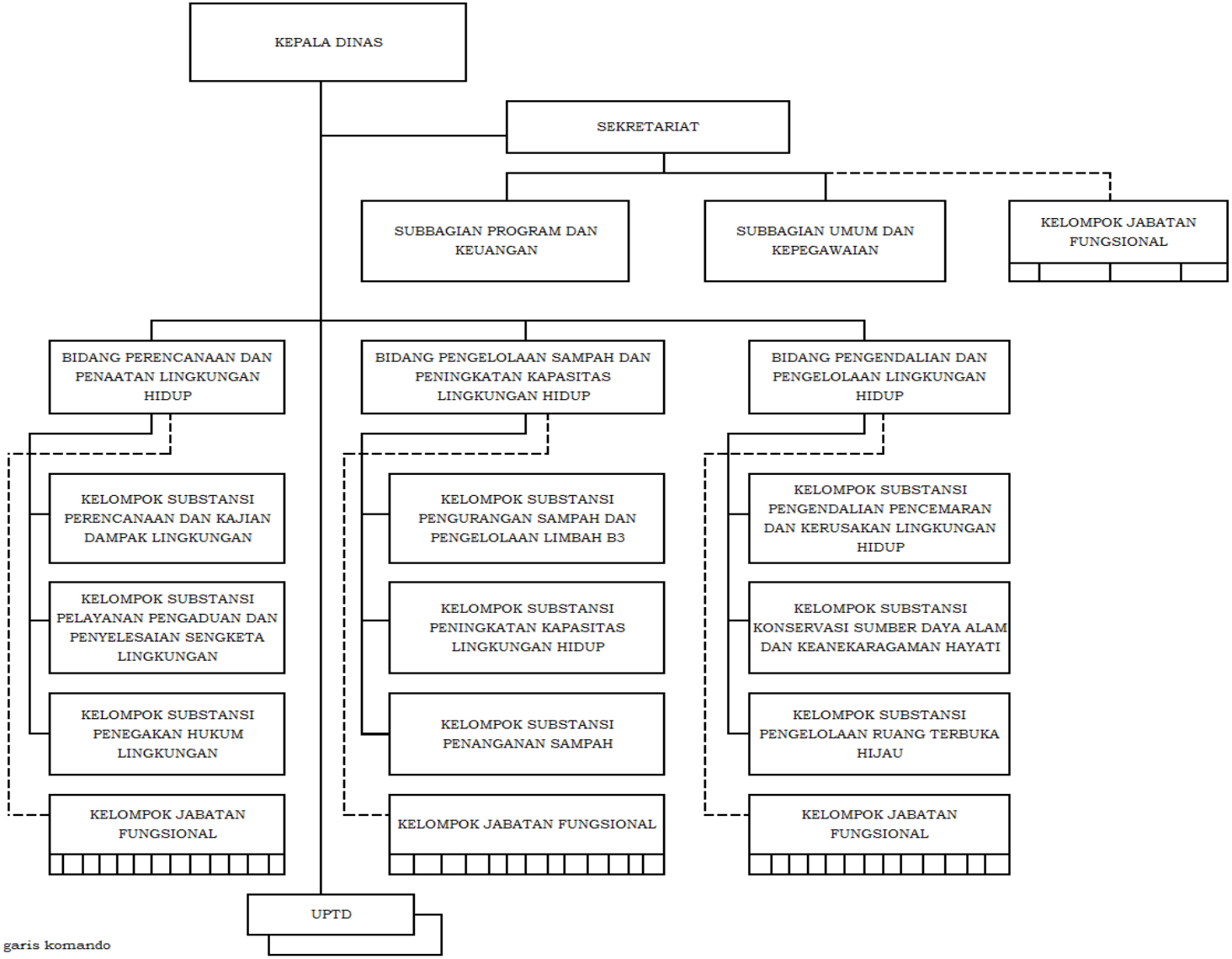

D. KONDISI AKTUAL

Kondisi aktual Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan:

- Tingkat pengurangan sampah masih rendah
- Tingkat pencemaran air sungai masih tinggi
- Menurunnya keanekaragaman hayati
- Polusi udara semakin meningkat

E. Analisa SWOT

Prediksi keadaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Faktor Internal
   a) Kekuatan
      - Program Peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu program strategis/unggulan daerah
      - Komitmen pimpinan daerah yang tinggi, salah satunya Program Strategis Bantul “Bersama” (Bersih Sampah 2025)
      - Potensi lahan konservasi dan keaneragaman hayati yang cukup baik
   b) Kelemahan
      - Keterbatasan SDM dan belum kompetitif, antara lain belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan tidak memadainya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
      - Sebagian kondisi sarana prasarana pengelolaan persampahan belum memadai
      - Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik
      - Dukungan kebijakan dan regulasi belum optimal

2. Faktor Eksternal
   a) Peluang
      - Pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup
      - Meningkatnya peran dan partisipasi LSM dan kelompok masyarakat pemerhati lingkungan dalam pengelolaan lingkungan
      - Perkembangan teknologi informasi yang tinggi
   b) Ancaman
      - Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup belum baik
      - Kondisi Bantul yang merupakan daerah hilir di DIY
      - Alih peruntukan dan penggunaan lahan
      - Ancaman kerusakan kawasan hutan keanekaragaman hayati

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
   a. Optimalkan pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama dalam mendukung program strategis daerah
   b. Optimalkan potensi konservasi dan keanekaragaman hayati melalui pemberdayaan masyarakat dan TI
2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :
   a. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
   b. Meningkatkan dukungan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
   a. Tingkatkan komitmen pimpinan daerah dalam membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

b. Optimalkan Program Strategis Daerah dalam mengatasi alih fungsi lahan dan ancaman kerusakan lingkungan

4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman

a. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan

b. Tingkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui kebijakan dan regulasi yang baik

BAB II
SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan serta prestasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun tersebut. Sebuah kebanggan apabila target tersebut dapat terpenuhi, dan akan menjadi pembelajaran serta cambuk untuk memacu pencapaian di masa berikutnya apabila target tersebut belum dapat tercapai pada tahun ini. Sasaran dan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	40,50
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	87,50
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	59
		Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	65,51
		Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	76,67

B. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Subkegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
				K	Rp
1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan**	**Persen**	**100**	**300.000.000**
1.03.12.5.02	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRSTanah kasultan an dan tanah kadipaten**	**Persn**	**100**	**300.000.000**
1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen KLHS RDTR Kawasan Bantul Timur	Dokumen	1	300.000.000
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**Angka**	**83,25**	**13.907.748.136**
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**10.900.000**
2.11.01.2.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	5.800.000
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	5.100.000
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**Persen**	**100**	**10.551.803.051**
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang/bulan	101	10.424.553.051
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	123.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Subkegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
				K	Rp
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	4.250.000
2.11.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Capaian pengelolaan retribusi daerah**	**persen**	**100**	**5.100.000**
2.11.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2	5.100.000
2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor**	**Persen**	**100**	**2.550.000**
2.11.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2.550.000
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian KinerjaPengelolaan AdministrasiUmum**	**Persen**	**100**	**615.012.065**
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	11.819.790
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	154.998.975
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket PeralatanR umah Tangga yang Disediakan	Paket	23	34.999.800
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	110.000.000
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	6.000.000
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Subkegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
				K	Rp
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	235.743.500
2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	2.550.000
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	54.900.000
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**Persen**	**100**	**708.528.600**
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	156.000.000
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	Laporan	4	45.760.000
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	506.768.600
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**2.013.854.420**
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	10	43.767.984
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	65	1.883.307.350
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4	41.350.000

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Subkegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
				K	Rp
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	3	45.429.086
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**Persen**	**57,14**	**1.041.845.000**
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**	**Persen**	**100**	**440.120.000**
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	351.225.000
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	88.895.000
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**	**Persen**	**100**	**601.725.000**
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	200.575.000
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHSRPJPD/RPJMDKabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	401.150.000
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara**	**Persen**	**75**	**2.405.262.581**
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan**	**Persen**	**68**	**1.478.868.681**
		Cakupan uji kualitas lingkungan	**Persen**	**100**	**648.543.900**

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Subkegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
				K	Rp
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	4	1.405.356.181
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	73.512.500
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	2	648.543.900
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Persen**	**50**	**45.225.000**
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	2	45.225.000
2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Persn**	**35**	**232.625.000**
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	2	232.625.000
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan**	**Persen**	**32**	**5.057.250.309**
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase RTH kawasan perkotaan**	**Persen**	**15**	**2.273.694.720**
		Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	**Persen**	**100**	**2.783.555.589**

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Subkegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
				K	Rp
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	92.225.000
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	28961	1.033.800.000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (UPTD KPP)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	2,8961	2.783.555.589
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	160	335.079.000
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	3	812.590.720
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3**	**Persen**	**33,1**	**15.300.000**
2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3**	**Persen**	**100**	**15.300.000**
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	10.100.000
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administras idan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	4	5.200.000

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Subkegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
				K	Rp
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup**	**Persen**	**23,33**	**105.395.800**
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan**	**Persen**	**100**	**105.395.800**
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	10	77.395.800
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	1	10.000.000
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatanyang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	30	5.250.000
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	30	12.750.000
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup**	**Persen**	**5**	**124.955.000**

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Subkegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
				K	Rp
	UNTUK MASYARAKAT				
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup**	**Lembaga**	**21**	**124.955.000**
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber DayaManusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	11	37.212.500
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	19.985.000
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/PelakuUsaha/Kegiatan yang terlibat	Kali	1	67.757.500
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional**	**Penghargaan**	**1**	**40.025.000**
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**	**Persen**	**100**	**40.025.000**
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/Filantrophiyang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	3	40.025.000
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persen**	**100**	**227.700.000**

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Subkegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
				K	Rp
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penanganan Aduan**	**Persen**	**100**	**227.700.000**
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	1	218.350.000
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi,Penyelesaian Sengketa,dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen	12	9.350.000
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**	**Persen**	**44,16**	**18.459.021.340**
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Persentase jumlah sampah yang terkurangi**	**Persen**	**21,35**	**11.746.194.800**
		Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA	**Persen**	**42,79**	**6.712.826.540**
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1	80.750.000
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	1	10.200.000

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Subkegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
				K	Rp
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD KPP)	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	33200	6.712.826.540
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat,Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	103	1.805.825.000
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1	21.150.000
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan diTPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	51	9.828.269.800

BAB III
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari Renstra yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul guna melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian Sasaran Perangkat Daerah selama periode satu tahun. RKT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul disusun agar terwujud Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Sebagai tindak lanjut tersusunnya RKT tahun 2023 adalah kewajiban melaksanakan program, kegiatan serta sub kegiatan dalam RKT tahun 2023 untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Dengan tersusun RKT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan maupun target tahunan yang hendak diwujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, Februari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ari Budi Nugroho, ST, M.Sc
NIP. 197103231999031002